

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman maka teknologi mengalami kemajuan bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Kemajuan teknologi informasi saat ini mempermudah kita dalam mengakses, mengkomunikasikan dan menyebarkan sebuah informasi secara cepat[1]. Salah satu teknologi informasi yang sering digunakan berupa internet. Internet merupakan interkoneksi sebetuk jaringan komputer yang dapat menyampaikan layanan informasi secara detail[1]. Internet dimanfaatkan sebagai media informasi yang sering digunakan lembaga politik, pemerintah atau perorangan untuk menyampaikan dan menyajikan sebuah informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Salah satu media informasi dengan internet yang banyak digunakan berupa *website*. *Website* dapat menyampaikan suatu informasi menjadi lebih efektif dan *ter up to dete*[2]. *Website* tidak hanya sekedar menyajikan informasi yang bersifat cenderung statis saja namun *website* sudah mulai berkembang menjadi media yang mempunyai sifat dinamis dan interaktif[3].

Teknologi informasi berbasis *website* ini diinginkan mampu memudahkan pihak-pihak terkait untuk mendapati informasi yang berkaitan dengan Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kabupaten Pekalongan[4]. *Website* KEJARI yang dimiliki dan dikelola oleh pihak Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kabupaten Pekalongan untuk saat ini tidak dapat beroperasi dalam menyampaikan dan menyajikan informasi kepada publik karena *website* telah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus peretasan *website* atau *cyber crime* didalam jaringan internet disebabkan adanya kerentanan *website* pada sistem keamanan *website*[5]. Dinas Komunikasi dan Informasi (DINKOMINFO) Kabupaten Pekalongan memiliki peran dalam pengolahan

layanan komunikasi dan pengembangan sistem informasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Oleh sebab itu, Kejaksaan Negeri (KEJARI) Kabupaten Pekalongan meminta bantuan dari pihak Dinas Komunikasi dan Informasi (DINKOMINFO) Kabupaten Pekalongan untuk melakukan pengembangan *website* KEJARI.

Pengembangan *website* terbagi menjadi tiga bagian yaitu *UI/UX* sebagai gambaran desain tampilan, *front-end* yang mengembangkan dan membuat tampilan situs *website*, dan *back-end* yang mengelola *website* agar terhubung dengan *front-end* sehingga *website* dapat bekerja. Penulis mendapat tugas untuk melakukan pengembangan *front-end website*. Berdasarkan studi kasus permasalahan *website* KEJARI maka diperlukan pengembangan *front-end website* pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan menggunakan *Bootstrap* sebagai kerangka kerja yang berfungsi menjadi template HTML dan CSS. Pengembangan *front-end website* pada KEJARI bertujuan untuk membangun tampilan *front-end website* baru dengan menggunakan referensi dari *website* KEJARI pada lembaga pemerintahan kota atau kabupaten di Jawa Tengah dan melakukan pengembangan tampilan *front-end website* pada *website* KEJARI Kabupaten Pekalongan sebelumnya untuk menghasilkan *website* KEJARI baru yang akan digunakan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan.

B. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan *front-end website* Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan menggunakan *Bootstrap*.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Pekalongan dengan membuat *website* Kejari atas dasar permintaan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan.

2. Pengembangan *front-end website* dibuat menggunakan Bootstrap sebagai kerangka kerja yang berfungsi untuk menjadi template HTML dan CSS.
3. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan/Kerja Praktik berlangsung selama satu bulan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan 9 September 2021.
4. Proses pengerjaan tugas pengembangan *front-end website* berjalan selama dua puluh dua hari.

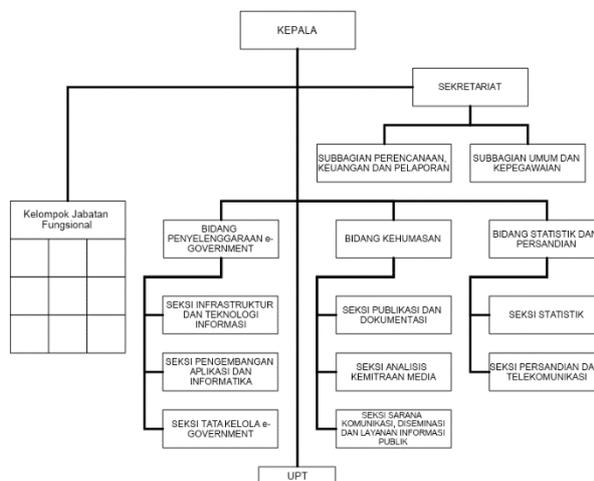
D. Aspek Umum dan Kelembagaan

1. Sejarah

Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Pekalongan adalah salah satu Dinas Teknis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan Komunikasi dan Informatika. DINKOMINFO Kabupaten Pekalongan secara legal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Secara nomenklatur, pembentukan DINKOMINFO Kabupaten Pekalongan berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2011 ini merupakan dinas baru, namun demikian secara operasional sebenarnya urusan pemerintahan yang terkait dengan komunikasi dan informatika sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan nama dan level kelembagaan yang berbeda. Namun, secara operasional kelembagaan DINKOMINFO baru secara resmi dijalankan pada bulan September 2011 yang ditandai dengan pelantikan pejabat DINKOMINFO.

2. Struktur Organisasi

DINKOMINFO mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan

3. Visi Misi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan

Visi dan misi DINKOMINFO Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut.

a. Visi

“Terwujudnya penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika yang handal menuju Kabupaten Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai Religiusitas”.

b. Misi

1. Meningkatkan keterbukaan Informasi Publik, Pengelolaan Aspirasi / Pengaduan Masyarakat.
2. Meningkatkan diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik, serta kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
3. Meningkatkan Pengembangan dan Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan Kualitas dan Integrasi Sistem Pelayanan Publik.
4. Meningkatkan Sistem *E-Literasi* Masyarakat dan Aparatur serta peran Komunitas dan Pengembangan Pemanfaatan TIK.
5. Meningkatkan Efektifitas dan Integrasi Layanan Infrastruktur, Akses Sistem Informasi Kelembagaan dan Tata Kelola TI

untuk mendorong Layanan Pemerintahan dan Layanan Publik yang terintegrasi dan berkualitas.

E. Metode Penulisan Laporan

1. Metode Wawancara

Metode wawancara dilakukan menggunakan teknik wawancara dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan untuk memperoleh jawaban sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pembuatan *website* dan penulisan laporan.

2. Metode Tinjauan Pustaka

Metode tinjauan pustaka dilakukan dengan mencari referensi tampilan *website* Kejaksaan Negeri kota lain pada internet, meninjau *website* Kejari sebelumnya yang terkena *hacking* sebagai referensi, dan referensi *website* pada YouTube.

3. Metode Diskusi

Metode diskusi dilakukan dengan cara perundingan atau pertukaran pemikiran antara penulis, rekan tim, dan pembimbing lapangan untuk melakukan pencarian masalah agar menda

F. Sistematika Penulisan Laporan

Untuk memudahkan penyusunan laporan dan pemahaman mengenai kandungan isi didalamnya, maka laporan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu.

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisikan uraian tentang gambaran umum latar belakang dibangunnya *front-end website*.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua berisikan teori-teori yang dijadikan acuan dalam implementasi *front-end website* menggunakan *Bootstrap*.

BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab tiga berisikan penjelasan teori, analisa kebutuhan, dan konsep kerja serta kinerja atau kegiatan yang didapatkan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan.

BAB IV PENUTUP

Bab empat berisikan mengenai kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan dan saran untuk pengembangan *front-end website* KEJARI Kabupaten Pekalongan kepada pembimbing lapangan di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pekalongan.